



Pemahaman Konsep Modal Sosial

Rissalwan Habdy Lubis

1. Definisi Modal Sosial

Luas jangkauan konsep yang dikembangkan tentang modal sosial bervariasi antar ahli. Konsep yang paling sempit dikemukakan oleh Putnam (1993), yang memandang modal sosial sebagai seperangkat hubungan yang horizontal (*horizontal associations*) antar orang. Menurutnya lagi, modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis.

Perhatian yang mencakup vertikal disampaikan Coleman (1988) yang mendefinisikan modal sosial sebagai *a variety of different entities, with two elements in common : they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors – whether personal or corporate actors – within the structure*. Dalam konsep ini, Coleman berusaha menjelaskan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok organisasi.¹ Konsep ini memasukkan hubungan-hubungan horizontal dan vertikal sekaligus, serta perilaku di dalam dan antara seluruh pihak dalam sistem sosial. Meski Coleman lebih tegas mengusung modal sosial, tetapi dia tidak memberikan pengertian modal sosial secara tegas. Demikian Coleman menulis:

Modal sosial ditetapkan oleh fungsinya. Modal sosial bukan merupakan sebuah entitas (*entity*) tunggal tetapi berbagai macam entitas yang berbeda, dengan dua elemen bersama: terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur itu. Sebagaimana bentuk modal lain, modal sosial adalah produktif, membuat mungkin pencapaian tujuan tertentu yang di dalam ketiadaannya akan tidak mungkin. Sebagaimana modal fisik dan modal manusia, modal sosial sama sekali tidak *fungible* tetapi mungkin *specific* untuk aktivitas tertentu. Tidak seperti bentuk modal lain, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara para pelaku dan diantara para pelaku (Coleman, 1988: 98)

Dengan definisi yang agak kabur ini, Coleman (1998) kemudian menetapkan kumpulan tindakan, hasil dan hubungan yang berbeda sebagai modal sosial. Modal sosial baginya adalah *inherently functional*, dan modal sosial adalah apa saja yang memungkinkan orang atau institusi bertindak. Modal sosial, karena itu, bukan merupakan sebuah mekanisme, sesuatu, atau sebuah hasil, tetapi merupakan beberapa atau semua dari mereka (mekanisme, sesuatu dan hasil) secara simultan.

Portes (1998) melihat ini sebagai sebuah langkah vital dalam evaluasi dan pengembangan (*proliferation*) ide modal sosial dan negara: “Coleman sendiri memulai pengembangan (*proliferation*) itu dengan memasukkan beberapa istilah mekanisme yang menghasilkan modal

¹ Francis Fukuyama dalam bukunya *Trust: The Social capital and the Creation of Prosperity* (1995)



sosial; konsekuensi dari kepemilikannya; dan organisasi sosial yang menyediakan konteks bagi sumber dan pengaruh. Akhirnya, modal sosial, bagi Coleman (1998), adalah netral secara normatif dan moral. Yaitu, modal sosial baik diinginkan maupun tidak diinginkan; modal sosial hanya memungkinkan tindakan terjadi dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Modal sosial didefinisikan oleh Bourdeu sebagai penggabungan dari sumber-sumber potensial yang berkaitan dengan pemilikan atas suatu jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dan terinstitusionalisasikan.² Ada beberapa mekanisme yang mengembangkan modal sosial seperti sikap saling tergantung, pelaksanaan norma-norma serta konsekuensi dari kepemilikan (misalnya hak-hak untuk mengakses informasi).³

Woolcock (Woolcock;1998) mendefinisikan modal sosial sebagai informasi, *trust*, dan *norms of reciprocity* yang melekat pada jaringan sosial dengan tujuan untuk menciptakan tindakan kolektif yang menguntungkan. Modal sosial didasarkan pada dua nilai, yaitu *primordiality* dan *civility*. Dasar ikatan *primordiality* adalah nilai-nilai primordial, seperti suku, agama, ras, atau klik. Sedangkan dasar ikatan *civility* adalah kebebasan, persamaan dan toleransi. Schaft dan Brown (2002) mengatakan bahwa modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah. Francis Fukuyama (1999) dengan meyakinkan berargumentasi bahwa Modal Sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal Sosial sebagai *sine qua non* bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang *social capital*, beberapa pengertian⁴ dan elemen-elemen dasar beserta sumbernya disajikan secara ringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Beberapa Pengertian dan Elemen Dasar dari *Social Capital*

Sumber	Pengertian dan Elemen Dasar dari <i>Social Capital</i>
Coleman (1988)	<i>Social capital consists of some aspects of social structures, and they facilitate certain actions of actors--wheter persons or corporate actors--within the structure</i>
Putnam <i>et.al</i> (1993)	<i>Features of social organization, such as trust, norms (or reciprocity), and networks (of civil engagement), that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions</i>
Narayan (1997)	<i>The rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relations, social structure and society's institutional arrangements which enable members to achieve their individual and community objectives</i>
World Bank (1998)	<i>Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions</i>

² Alejandro Portes, *Social Capital : Its Origins and Aplications in Modern Sociology*, dalam Annual Review of Sociology Vol. 24, 1998.

³ *Ibid.*

⁴ Dengan maksud untuk tetap menjaga pengertian sesuai dengan aslinya, definisi dan elemen *social capital* tetap dituliskan dalam bahasa aslinya, diharapkan tidak merusak *sense* dari pencetusnya. Urutan tersebut tidak menggambarkan tingkat kepentingan atau kebenaran tetapi semata hanya didasarkan pada tahun publikasinya.



Uphoff (1999)	<i>Social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior</i>
Dhesi (2000)	<i>Shared knowledge, understandings, values, norms, and social networks to ensure the intended results</i>

Sumber : Subejo, Peranan *Social Capital* dalam Pembangunan Ekonomi, 2004

2. Elemen-Elemen Dalam Modal Sosial

Berbeda dengan modal manusia yang menekankan segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada Modal Sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial mencakup *institutions, relationships, attitudes* dan *values* yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi-interaksi antar orang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Menurut World Bank (1998) *social capital* tidaklah sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama. *Social capital* meliputi *shared values* dan *rules* bagi perilaku sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan antar personal, *trust* dan *common sense* tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, semua hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu-individu.

Mendasarkan pada beberapa pengertian dan elemen penyusun *social capital* seperti tersebut dalam Tabel 1, nampaknya dapat dilakukan suatu generalisasi dan simplifikasi tentang elemen-elemen utama dari *social capital*. Simpulan sederhana dan umum yang dapat diajukan tentang elemen utama *social capital* mencakup *norms, reciprocity, trust*, dan *network*. Keempat elemen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan yang mampu mengakomodasi kepentingan individu yang melakukan kerjasama maupun kelompok secara kolektif. Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (*trust*), eksistensi jaringan (*network*), dan kemudahan bekerja sama (*ease of cooperation*).

Secara inheren *social capital* mengandung *social sense*. Hampir semua bentuk *social capital* terbentuk dan tumbuh melalui gabungan atau kombinasi tindakan dari beberapa orang. Keputusan masing-masing pemain atau pelaku memiliki konsekwensi kepada semua anggota kelompok atau group. Sehingga hal tersebut mencerminkan suatu atribut dari struktur sosial. Seperti dikemukakan oleh Dhesi (2000:201) bahwa *social capital* bukan merupakan *private property* dari orang yang mendapat manfaat darinya. Hal ini hanya akan muncul dan tumbuh kalau dilakukan secara bersama (*shared*). Sehingga *social capital* bisa dikatakan sebagai *property* dari *public good*. *Social capital* akan tumbuh dan semakin berkembang kalau digunakan secara bersama dan sebaliknya akan mengalami kemunduran atau penurunan bahkan suatu kepunahan dan kematian kalau tidak digunakan atau dilembagakan secara bersama.



Social capital tidak dapat diwariskan sepenuhnya secara otomatis dari generasi ke generasi seperti pewarisan genetik dalam pengertian biologi. Pewarisan *social capital* dan nilai-nilai yang menjadi atributnya memerlukan suatu proses adaptasi, pembelajaran serta pengalaman dalam praktek nyata. Proses ini akan tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang melalui interaksi yang berulang-ulang yang memungkinkan susana untuk saling membangun kesepahaman, kepercayaan serta nilai dan aturan main yang disepakati bersama antar pelaku kerjasama.

3. Bentuk Modal Sosial

Dalam modal sosial ada bentuk-bentuk yang menjadi komponen penting, yang menyertai modal sosial, yaitu *trust* (kepercayaan), *belief* (percaya), *norms* (norma-norma), *rules* (aturan-aturan) dan *networks* (jaringan).

Trust (Rasa Percaya)

Modal sosial wujudnya memang tidak jelas, tidak seperti halnya modal ekonomi yang wujudnya jelas yaitu uang. Kunci dari modal sosial adalah *trust*. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang saling mempercayai dan dipercayai. Modal sosial akan bertahan bila aktor-aktor di dalamnya mampu mempertahankan keuntungan dalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya. Modal sosial dapat dimiliki oleh individu lewat interaksinya dengan individu yang lainnya.

Trust atau **rasa percaya** (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Robert D Putnam, 1993, 1995, dan 2002). Dalam pandangan Fukuyama *trust* didefinisikan sebagai “*the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly share norms, on the part of other members of that community*” (Fukuyama, 1995, hal. 26). Sementara Ostrom dan Ahn (2003), menggambarkan *trustworthiness* sebagai nilai yang tertanam dalam diri (*intrinsic values*) dan motivasi dalam diri (*intrinsic motivation*) seseorang untuk selalu bertindak secara kooperatif, selalu bekerja sama. Pendek kata, istilah “*trust*” di sini berhubungan dengan kejujuran dan kerjasama yang ada di antara orang-orang dalam sebuah komunitas.

Primordiality maupun *civility* dapat memunculkan apa yang disebut sebagai *trust*, yaitu kepercayaan kepada pihak lain sepanjang lingkaran di mana *trust* itu ada, muncul tanpa jaminan apapun. *Trust* itu oleh Deutsch (Deutsch;1954) dikatakan sebagai :

*Expectation of occurrence of an event where this expectation leads to behaviour which the individual perceives to have positive motivational consequences if the expectation is, confirmed, and negative motivational consequences if is not.*⁵

⁵ Bayu Falianto, *Dinamika Terbentuknya Trust (Suatu Studi pada Nasabah BCA Cabang Depok)*, Skripsi Sarjana Strata 1, FISIP-UI, 1999, hal 16.



Lebih sempit lagi Dasgupta (1999) melihat *trust* sebagai :

*Individual forming expectations about action of others that have a bearing on this individual's choice of action, when that action must be chosen before he or she can observe the actions of those others.*⁶

Dengan *trust* maka masalah-masalah yang muncul menjadi mudah untuk diselesaikan, dan sebaliknya menjadi begitu sulit ketika *trust* tidak ada. Namun, ketika *trust* yang muncul berbasiskan *primordiality*, maka siapapun yang tidak memiliki identitas *primordiality* yang sama akan diabaikan. Masalah-masalah seperti nepotisme, diskriminasi rasial, dan kolusi, tumbuh dengan latar belakang seperti ini.

Belief (Percayaan)

Menurut Coleman (1990) sebuah komunitas manusia selalu perlu kepercayaan bersama (*shared beliefs*) sebagai “bahan bakar” penting bagi tindakan kolektif. Secara khusus *beliefs* ini sangat erat berkaitan dengan alur informasi dalam sebuah jaringan. Coleman mengatakan bahwa segala hal yang dipercaya oleh sebuah komunitas selalu berkaitan dengan segala informasi yang masuk ke, dan keluar dari, komunitas itu. Lalu, menurut Adler dan Kwon, nilai *shared belief* dalam modal sosial ini menciptakan semacam kenyamanan bagi para anggota komunitas untuk saling bertukar pikiran (*ide*) dan secara bersama-sama memahami dunia sekeliling mereka. Berdasarkan *beliefs* ini pulalah sebuah komunitas membangun semacam “dunia ide” bersama (Lesser, 2000).

Norms (Norma-Norma)

Menurut Coleman, sebuah norma selalu “*specify what actions are regarded by a set of persons as proper or correct, or improper or incorrect*” (1990, hal. 242). Dengan kata lain, sebuah norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa formal maupun informal sebagai semacam kebijakan, sehingga semua orang yang memiliki norma ini harus menyadari keberadaan dan isi kebijakan tersebut. Maka itu, norma hanya akan muncul jika ada komunikasi dan keberadaannya bergantung pada komunikasi yang reguler. Elinor Ostrom (2005) membedakan norma dari peraturan dengan melihat sintaksis kalimatnya. Baik norma maupun peraturan sama-sama merupakan pernyataan tentang apa yang boleh dilakukan, tetapi “peraturan” mengandung penegakan (*enforcement*). Sebuah peraturan juga mengandung kata “JIKA TIDAK” yang diikuti dengan sangsi. Jadi, “norma” terkesan lebih lunak daripada peraturan (*rules*).

Rules (Aturan-Aturan)

Menurut Coleman, “*social capital requires investment in the designing of the structure of obligations and expectations, responsibility and authority, and norms (or rules) and sanctions*

⁶ Partha Dasgupta, *Economic Progress and the Idea of Social Capital*, dalam *Social Capital : A Multifaceted Perspective*, World Bank, Washington D.C., 2000, hal.330.



which will bring about an effectively functioning organization” (1990, hal. 313). Sedangkan menurut Putnam, di dalam setiap “peraturan” di sebuah komunitas, terkandung asas resiprokal (berbalasan) dan harapan (ekspektansi) tentang tindakan-tindakan yang patut dilakukan secara bersama-sama. Melalui peraturan-peraturan inilah setiap anggota komunitas menata tindakannya. (hal. 178-179). Ostrom dan Ahn (2003) menyatakan: “Rules are the results of human beings’ efforts to establish order and increase predictability of social outcomes [...] therefore a rule of law, a democratic atmosphere, and a well-structured government (if these exist) are valuable social capital for any society”.

Networks (Jaringan)

Sebagaimana dikatakan Putnam, pemikiran dan teori tentang modal sosial memang didasarkan pada kenyataan bahwa “jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas. Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik atau physical capital) atau pendidikan (disebut juga human capital). Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama. (Putnam, 2000, hal. 18-19).

4. Pendekatan

4.1. Perspektif Governance

Ada kecenderungan bahwa seolah-olah modal sosial hanya dapat dikembangkan oleh komunitas dimana modal sosial tersebut beroperasi. Sehingga modal sosial seakan-akan hanya merupakan wilayah kerja masyarakat sipil (*civil society*) dimana inisiatif lokal, organisasi sosial, lembaga non-pemerintah dan gerakan-gerakan partisipasi lokal lainnya merupakan garda depan dalam membangun modal sosial. Kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan sosial, dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan kondisi dengan mana modal sosial suatu komunitas dapat dikembangkan atau sebaliknya.

Dalam konteks kebijakan publik, modal sosial pada intinya menunjuk pada *political will* dan penciptaan jaringan-jaringan (*networks*), kepercayaan (*trust*), nilai-nilai bersama (*common values*), norma-norma (*norms*), dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat.

Pemerintah dapat mempengaruhi secara positif kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi sosial dalam sebuah komunitas. Modal sosial pada umumnya akan tumbuh dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, melainkan pula karena adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi, terjalannya relasi yang berkelanjutan, serta terpeliharanya komunikasi dan dialog yang efektif.



4.2. Perspektif Ekonomi dan Individual

Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (*strong community*), masyarakat sipil yang kokoh, maupun identitas negara-bangsa (*nation-state identity*). Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. (Blakeley dan Suggate, 1997; Suharto 2005a; Suharto 2005b)

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya, yang juga dapat dikatakan akan memunculkan nilai-nilai dan norma-norma bersama. bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan (*trust*) yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 1995).

Menurut Tonkiss (2000), modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi. Pada kenyataannya jaringan sosial, sebagai bagian dari modal sosial, tidaklah cukup karena belum mampu menciptakan modal fisik dan modal finansial yang juga dibutuhkan.

Istilah “kapital” lebih dikenal dalam kegiatan ekonomi. Pengertian ini membawa bias dalam pemaknaan modal sosial. Dalam pengertian yang mendasar menurut kalangan ekonom, modal sosial berperan dalam mekanisme alokasi sumber daya. Dalam ilmu ekonomi, modal sosial pada tingkat mikro berguna untuk memfungsikan pasar, dan pada level makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal sosial terlihat dari bagaimana lembaga, *legal frameworks*, dan peran pemerintah dalam organisasi produksi mempengaruhi kinerja ekonomi makro. Dalam konteks ini, modal sosial menjadi dasar bagi orang yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dalam kelompok atau organisasi.

Dalam laporan World Bank (2006), ada bukti yang nyata bahwa perdagangan pada level makro dipengaruhi oleh modal sosial. Meskipun modal sosial paling umum hadir pada kegiatan ekonomi mikro, namun modal sosial berimplikasi pada dampak dari perdagangan, migrasi, reformasi ekonomi dan integrasi regional. Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi identifikasi untuk mengukur kinerja ekonomi (Knack and Keefer, 1997). Pada level makro indikatornya adalah munculnya *trust*, *civic norms* dan aspek modal sosial sebagai dasar untuk



pembangunan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan La Porta et al. (1997): “...*cross-country analyses are pointing to social capital as an important ingredient in economic performance*”.

Seperti diungkapkan oleh Busse (2001), dalam hidup keseharian, modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Di saat pekerjaan yang ada tidak memberikan pendapatan yang memadai maka dicarilah pekerjaan sampingan dimana pada umumnya sangat ditentukan oleh modal sosial yang dimiliki, yaitu keanggotaan dari jaringan sosial individual.

Penelitian Fafchamps dan Minten (1999) memperoleh kesimpulan bahwa akumulasi modal sosial terbukti memberikan peran yang sangat nyata dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, *return to social capital* dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Fafchamps dan Minten menyatakan : “*Hence, we conclude that a large part of the effect of business experience on performance seems to come from the accumulation of social capital over time and less from the development of other types of expertise*”. Pengukuran modal sosial memperlihatkan tumbuhnya nilai tambah secara signifikan di atas kepemilikan sarana, kapital tenaga kerja, *human capital*, dan keterampilan manajemen. Dua hal penting yang membangun modal sosial adalah jumlah pedagang lain yang dikenal dan jumlah orang yang siap membantu jika menghadapi permasalahan. Selain itu, hubungan bukan keluarga terbukti lebih berperan dibandingkan hubungan keluarga.

Penelitian Brata (2004) di Yogyakarta menemukan bahwa modal sosial berupa jaringan sekampung halaman telah membuka jalan untuk jaringan sosial yang ada dan bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal, ketika bantuan formal dari pemerintah sangat terbatas. Modal sosial yang mereka miliki telah menciptakan nilai ekonomi bagi dirinya. Keadaan ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Bastelaers (2000), bahwa anggota masyarakat yang paling miskin yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, menjadikan jaringan-jaringan sosial sebagai elemen penting untuk memenuhi permodalannya.

Modal sosial juga mampu membangkitkan kemitraan, sebagai salah satu bentuk relasi yang diidealkan dalam kegiatan ekonomi. Penelitian Kolopaking (2002) mendapatkan bahwa modal sosial berperan mulai dari kegiatan tahap awal dalam kegiatan di tingkat komunitas, dilanjutkan dengan memproduksi usaha kecil dan gurem dari komunitas ke organisasi desa, dan akhirnya menjadi unsur pengelolaan kolaborasi serta memelihara jejaring kolaborasi. Meskipun proses ini berhasil karena ada pihak luar yang menjadi fasilitator, namun keberadaan modal sosial dalam masyarakat sangat berperan dalam membentuk kesamaan opini di antara *stakeholders*.

Jejaring menjadi sarana untuk membentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan prinsip-prinsip kesetaraan, informal dan partisipatif dalam membangun komitmen, maka masalah-masalah pengembangan kemitraan usaha berbasis komunitas dapat ditangani secara sinergis. Dengan demikian, pilar utama mensinergikan antara pengembangan kemitraan usaha kecil atau gurem dengan ekonomi kawasan adalah dengan membentuk usaha masyarakat berbasis komunitas. Implikasinya adalah bahwa dari pengembangan kolaborasi tersebut,



pengelolaan kemitraan memerlukan muatan solidaritas moral semua pihak yang merupakan indikator dari modal sosial yang tumbuh dalam diri mereka.

4.3. Perspektif Komunitas dan Kebudayaan

Jika melihat definisi modal sosial menurut James Coleman di atas, maka terlihat modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Putnam juga menekankan bahwa modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaring kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama.

Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak luar.